



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1457, 2014

KEMENKEU. Data. Informasi. Perpajakan.
Penyampaian. Tata Cara. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 191 /PMK.03/2014

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 16/PMK.03/2013 TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN
INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN
INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.03/2013;
 - b. bahwa terhadap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain yang diwajibkan menyampaikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana tersebut dalam huruf a terdapat perubahan jenis data dan informasi yang harus disampaikan dan penambahan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, penambahan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, serta rincian jenis data dan informasi dilakukan dengan mengubah Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana tersebut dalam huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor 132/PMK.03/2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.03/2013 TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN.

Pasal I

Mengubah angka 10, 13, 17, 25, 26 dan 29 serta menambah 22 (dua puluh dua) angka yaitu angka 40 sampai dengan angka 61 pada kolom 1 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.03/2013, sehingga angka 10, 13, 17, 25, 26 dan 29 serta angka 40 sampai dengan angka 61 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2014
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 191/PMK.03/2014
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 16/PMK.03/2013 TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN
INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPALAN DATA DAN
INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN

Daftar Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain,
Rincian Jenis Data dan Informasi, Bentuk Data, Cara dan Jadwal Penyampaian

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
10	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	I. Data Izin Prinsip Penanaman Modal, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. Alamat Perusahaan 5. NPWP 6. Nomor Telepon Perusahaan 7. Negara 8. Jenis Perumahan 9. Bidang Usaha 10. Lokasi Proyek 11. Valuta 12. Nilai Investasi	Izin dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.	Elektronik	Online	1 Mei 2013	Bulanan

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		II. Data Izin Usaha untuk berbagai Sektor Usaha, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. Alamat Perusahaan 5. NPWP 6. Nomor Telepon Perusahaan 7. Negara 8. Jenis Perumahan 9. Bidang Usaha 10. Lokasi Proyek 11. Valuta 12. Nilai Investasi	Adalah izin dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa.	(5) Elektronik	(6) <i>Online</i>	(7) 1 Mei 2013	(8) Bulanan
		III. Data Izin Usaha Perluasan untuk berbagai Sektor Usaha, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin	Izin usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa	(5) Elektronik	(6) <i>Online</i>	(7) 1 Mei 2013	(8) Bulanan

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. Alamat Perusahaan 5. NPWP 6. Nomor Telepon Perusahaan 7. Negara 8. Jenis Perumahan 9. Bidang Usaha 10. Lokasi Proyek 11. Valuta 12. Nilai Investasi	atas pelaksanaan perluasan usaha.				
		IV. Data Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. Alamat Perusahaan 5. NPWP 6. Nomor Telepon	Izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.	Elektronik	Online	1 Mei 2013	Bulanan

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Perusahaan 7. Negara 8. Jenis Perumahan 9. Bidang Usaha 10. Lokasi Proyek 11. Valuta 12. Nilai Investasi					
		V. Data Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. Alamat Perusahaan 5. NPWP 6. Nomor Telepon Perusahaan 7. Negara 8. Jenis Perumahan 9. Bidang Usaha 10. Lokasi Proyek	Izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya.	Elektronik	Online	1 Mei 2013	Bulanan

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		11. Valuta 12. Nilai Investasi VI. Data Izin Usaha Perubahan untuk berbagai Sektor Usaha, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. Alamat Perusahaan 5. NPWP 6. Nomor Telepon Perusahaan 7. Negara 8. Jenis Permohonan 9. Bidang Usaha 10. Lokasi Proyek 11. Valuta 12. Nilai Investasi VII. Data Izin Usaha Penggabungan Perusahaan	Izin usaha yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya.	Elektronik	Online	1 Mei 2013	Bulanan
			Izin usaha yang wajib dimiliki perusahaan hasil	Elektronik	Online	1 Mei 2013	Bulanan

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>Penanaman Modal untuk berbagi Sektor Usaha, yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. Alamat Perusahaan 5. NPWP 6. Nomor Telepon Perusahaan 7. Negara 8. Jenis Perumahan 9. Bidang Usaha 10. Lokasi Proyek 11. Valuta 12. Nilai Investasi 	<p>penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang atau jasa.</p>	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>VIII.Data Fasilitas Bea Masuk atas Impor Mesin, yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 	<p>Persetujuan Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan tentang pemberian fasilitas bea masuk atas impor mesin.</p>	Elektronik	Online	1 Mei 2013	Bulanan

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Nama Perusahaan 4. Alamat Perusahaan 5. NPWP 6. Identitas/jenis mesin 7. Nilai legalisasi IX. Data Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. Alamat Perusahaan 5. NPWP 6. Jenis barang dan bahan 7. Kuantitas/Nilai Barang dan Bahan	Persetujuan Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan tentang pemberian fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan.	Elektronik	Online	1 Mei 2013	Bulanan
13	Direktorat Perhubungan Kementerian Jenderal Laut,	I. Laporan Realisasi Kedatangan dan Keberangkatan Kapal yang	Laporan bulanan yang menunjukkan realisasi kedatangan dan keberangkatan	Elektronik	Online	1 September 2013 (Data)	Bulanan (paling lambat tanggal 10

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Perhubungan	<p>paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Perusahaan 2. Nama Kapal 3. Ukuran Kapal 4. Bendera Kapal 5. Pelabuhan Asal 6. Tanggal Kedatangan 7. Pelabuhan Tujuan 8. Tanggal Keberangkatan 9. Bongkar/Muat 10. Ekspor/Impor 11. Jenis Muatan 12. Tonase 13. Nama Perusahaan Bongkar Muat <p>II. Data Pelabuhan di seluruh Indonesia</p>	<p>kapal yang dilaporkan oleh Otoritas Utama/KSOP/Unit Pelabuhan (UPP) kepada Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan</p>	(5)	(6)	Januari s.d Juli 2013	bulan berikutnya
		Data seluruh pelabuhan di Indonesia di bawah pengelolaan Direktorat Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	Data seluruh pelabuhan di Indonesia di bawah pengelolaan Direktorat Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	Elektronik	Online	1 September 2013	Tahunan

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		III. Data Surat Izin Usaha Angkutan Laut (SIUPAL), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor SIUPAL 2. Tanggal SIUPAL 3. Nama Perusahaan 4. NPWP Perusahaan 5. Alamat Domisili 6. Nama Penanggung Jawab 7. Alamat Penanggung jawab		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014 (data tahun 2001 s/d Oktober 2014)	Tahunan (bulan Februari tahun berikutnya)
		IV. Data Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor SIOPSUS 2. Tanggal SIOPSUS 3. Nama Perusahaan 4. NPWP Perusahaan 5. Alamat Domisili 6. Nama Penanggung Jawab 7. Alamat Penanggung jawab		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014 (data tahun 2001 s/d Oktober 2014)	Tahunan (bulan Februari tahun berikutnya)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		V. Data Surat Izin Usaha Keagenan Awak Kapal, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. NPWP Perusahaan 5. Alamat Perusahaan 6. Masa Berlaku 7. Nama Penanggung jawab 8. NIK Penanggung Jawab		Elektronik	Langsung (<i>email</i>)	1 Desember 2014 (data mulai Januari 2014 s/d Oktober 2014)	Tahunan (bulan Februari tahun berikutnya)
		VI. Pendaftaran Hak Milik Kapal, yang paling sedikit memuat: 1. Nama kapal 2. Nama kapal sebelumnya 3. <i>Gross Tonnage/Net Tonnage</i> kapal 4. Jenis kapal 5. Tempat pendaftaran kapal 6. Tanggal pendaftaran		Elektronik	Langsung (<i>email</i>)	1 Desember 2014 (data mulai Januari 2014 s/d Oktober 2014)	Tahunan (bulan Februari tahun berikutnya)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17	Kementerian Perdagangan	7. Tanda pendaftaran 8. Nama pemilik 9. Alamat/Kedudukan pemilik 10. NPWP/NIK pemilik I. Data Profil Pelaku Perizinan Ekspor-Import di Kementerian Perdagangan RI, yang memuat: 1. Jenis Perizinan 2. Nomor izin 3. Tanggal izin 4. Nama Perusahaan 5. NPWP Perusahaan 6. Alamat Perusahaan 7. Penanggung Jawab 8. Negara asal/tujuan 9. Uraian barang 10. Jumlah barang II. Data Surat Keterangan Asal	Data ini merupakan profil pelaku untuk seluruh kegiatan perizinan: 1. eksportir terdaftar, 2. persetujuan eksportir 3. Importir terdaftar 4. Persetujuan impor	Elektronik	Online	1 Agustus 2013	Bulanan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		(SKA), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor SKA 2. Tanggal SKA 3. Nama perusahaan 4. NPWP perusahaan 5. Alamat perusahaan 6. Negara tujuan 7. Uraian barang 8. Volume barang 9. Nilai barang III. Data Angka Pengenal Importir (API), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor API 2. Tanggal API 3. Nama perusahaan 4. NPWP perusahaan 5. Alamat perusahaan 6. Nomor akta pendirian/Notaris 7. Nomor Tanda Daftar				2013	(paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)
				Elektronik	Online	1 Agustus 2013	Bulanan (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Perusahaan (TDP) 8. Referensi Bank Devisa 9. Jenis barang/jasa 10. Surat Izin Usaha Perdagangan/izin usaha lain yang sejenis					
		IV. Tanda Pendaftaran, yang memuat: 1. Nama Perusahaan 2. Alamat Perusahaan 3. Penanggung Jawab (tertera dalam Akte) 4. Keterangan lainnya a. Nama prinsipal (khusus untuk Surat Tanda Pendaftaran Agen/ Distributor barang dan atau Jasa Produksi Dalam/Luar Negeri) b. Penerima Waralaba	Jenis tanda pendaftaran meliputi: a. Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang dan atau Jasa Produksi Dalam/Luar Negeri b. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba c. Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purma Jual dalam Bahasa Indonesia	Elektronik	Online	10 Desember 2014	Tahunan

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		<p>dan Merk Waralaba (khusus untuk Surat Tanda Pendaftaran Waralaba)</p> <p>c. Asal barang (khusus Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia)</p> <p>V. Surat Tanda Penerimaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Perusahaan 2. NPWP Perusahaan 3. Alamat Perusahaan 4. Penanggung Jawab (tertera dalam Akte) 5. Modal dasar 		Elektronik	Online	10 Desember 2014	Tahunan

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		VI. Data Izin Wakil Pialang Berjangka, yang memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Wakil Pialang Berjangka 4. Nama Perusahaan Pialang Berjangka 5. Alamat wakil pialang berjangka 6. Lokasi/alamat penempatan kantor Wakil Pialang Berjangka 7. Nomor KTP wakil pialang berjangka	Data ini merupakan izin untuk melakukan kegiatan sebagai wakil pialang berjangka	Elektronik	Online	10 Desember 2014	Tahunan
		VII. Data Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka, yang memuat: 1. Perseorangan a. Nomor Izin b. Tanggal Izin	Data ini merupakan izin untuk melakukan kegiatan sebagai pedagang berjangka	Elektronik	Online	10 Desember 2014	Tahunan

No (1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		c. Nama pedagang berjangka d. Alamat pedagang berjangka 2. Perusahaan a. Nomor Izin b. Tanggal Izin c. Nama pedagang berjangka d. Alamat pedagang berjangka e. Nomor telepon dan faksimile		(5)	(6)	(7)	(8)
		VIII. Data Surat Keterangan Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia (SKPLBI), yang memuat: 1. Nama Perusahaan 2. NPWP Perusahaan 3. Alamat Perusahaan 4. Status Perusahaan		Elektronik	Online	10 Desember 2014	Tahunan

No (1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
25	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	(Produsen/Importir) 5. Penanggung jawab perusahaan 6. Nomor telepon/ faksimile/ email I. Data Cadangan atas Minyak Bumi dan Gas Bumi Per wilayah II. Data Penjualan Ekspor dan Pembelian Impor kegiatan hilir III. Data daftar harga sumber daya energi	(4) Informasi data cadangan terbukti atas minyak bumi dan gas bumi per wilayah	(5) Elektronik	(6) Langsung	(7) 1 Desember 2013	(8) Tahunan (setiap akhir bulan April tahun berikutnya)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
26	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)	I. Data Kontrak Migas Aktif (per wilayah kerja), paling sedikit memuat : 1. Nama Kontraktor 2. Nama Operator 3. NPWP Operator 4. Alamat Operator 5. <i>Persentase Interest</i> 6. Tanggal kontrak ditanandatangani 7. Tanggal kontrak berakhir 8. Wilayah Kerja 9. Status Wilayah Kerja (Eksplorasi/Eksploitasi)	Data Tahunan kontrak migas aktif yang memuat data wilayah kerja migas	Elektronik	Langsung	1 Agustus 2013	Tahunan (paling lambat bulan April tahun berikutnya)
		II. Data <i>Plan of Development</i> (<i>PoD</i>) 1. Surat persetujuan <i>PoD</i> Pertama dari satu wilayah kerja (<i>scanned documents</i>)	<i>Plan of Development (PoD)</i> Pertama dari satu wilayah kerja	Elektronik	Langsung	1 Agustus 2013	Tahunan (paling lambat bulan April tahun berikutnya)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>mulai tahun 2009</p> <p>2. Surat persetujuan PoD dari satu wilayah kerja (<i>scanned documents</i>) sebelum tahun 2009 berdasarkan permintaan DJP</p>	<p><i>Plan of Development (PoD)</i> dari satu wilayah kerja yang telah disetujui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi</p>				
		<p>III. <i>Data Work Program and Budget (WP & B)</i> revisi, yang paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama KKKKS 2. NPWP Operator 3. Alamat Operator 4. Nama Wilayah Kerja 5. Jenis biaya yang dikeluarkan (<i>exploration, development, production, General Administration</i>) 6. Jumlah biaya 	<p>Data Tahunan <i>Work Program and Budget (WP & B)</i> revisi yang telah disetujui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi</p>	Elektronik	Langsung	1 Agustus 2013	Tahunan (setiap awal bulan Desember tahun yang bersangkutan)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		IV. <i>Closed Out AFE (Authorization For Expenditure)</i> , paling sedikit memuat : 1. Nama KKKS 2. NPWP KKKS 3. Alamat KKKS 4. Nama Wilayah Kerja 5. Nama Proyek 6. Nomor AFE 7. Nomor & tanggal surat persetujuan AFE 8. Nilai persetujuan (Nominal)	Data persetujuan <i>Closed Out AFE</i> yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Elektronik	Langsung	1 Agustus 2013	Tahunan (paling lambat bulan April tahun berikutnya)
		V. <i>Data Financial Quarterly Report (FQR)</i> - Terpisah Minyak & Gas, paling sedikit memuat : 1. Nama KKKS 2. NPWP KKKS 3. Alamat KKKS 4. Nama Wilayah Kerja	Data FQR Final dan FQR Hasil Verifikasi oleh SKK Migas yang menjadi dasar perhitungan <i>over/under lifting</i> setiap tahun oleh setiap KKKS Migas	Elektronik	Langsung	1 Agustus 2013	Tahunan (paling lambat tanggal 1 Juli tahun berikutnya)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. <i>Lifting (Volume)</i> 6. <i>Gross Revenue</i> 7. <i>First Tranche Petroleum (FTP)</i> 8. <i>Cost Recovery</i> 9. <i>Investment Credit</i> 10. <i>Interest Cost Recovery</i> 11. <i>Government Share</i> 12. <i>Contractor share:</i> 13. <i>FTP share</i> 14. <i>Equity share</i> 15. <i>Lifting Price Variance</i> 16. <i>Domestic Market Obligation (DMO)</i> 17. <i>DMO Fee</i> 18. <i>Bonus</i> 19. <i>Tarif Pajak (persentase)</i> 20. <i>PPs & PBDR</i>					
		VI. <i>Data PPN Reimbursement (per NPWP & Nama KKKS), paling sedikit memuat :</i>	Data Triwulan Perumahan kembali Data Triwulan Pembayaran	Elektronik	Langsung	1 Agustus 2013	Triwulanan (Setiap akhir bulan)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Vendor 2. NPWP Vendor 3. Alamat Vendor 4. Nomor Faktur 5. Tanggal Faktur 6. Nilai PPN (Nominal) 7. Uraian / Jenis Transaksi 	PPN/PPnBM yang disampaikan KKKs kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi				berikutnya setelah triwulan)
		<p>VII. Data Pengalihan <i>Interest</i>, paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama yang mengalihkan 2. NPWP yang mengalihkan 3. Alamat yang mengalihkan 4. Nama penerima <i>interest</i> 5. NPWP penerima <i>interest</i> 6. Alamat penerima <i>interest</i> 7. Nama Operator 8. NPWP Operator 9. Alamat Operator 10. Tanggal Pengalihan (<i>Deed of Assignment</i>) 	Informasi data pengalihan <i>interest</i>	Elektronik	Langsung	1 Agustus 2013	Tahunan (paling lambat bulan April tahun berikutnya)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		11. Surat Persetujuan Dirjen Migas (No. surat & tanggal) 12. Persentase yang dialihkan 13. Wilayah yang dialihkan 14. Nilai pengalihan/ ekuivalen		(5)	(6)	(7)	(8)
29	Lembaga Penerbangan	VIII. Data Produksi per tahun, yang paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan 2. NPWP perusahaan (Operator) 3. Alamat perusahaan 4. Besarnya hasil produksi	Besarnya hasil produksi meliputi minyak dan gas bumi	Elektronik	Langsung	1 Desember 2013	Tahunan (setiap akhir bulan April tahun berikutnya)
		I. Data penginderaan jauh yang diterima stasiun bumi		Elektronik	Langsung	1 Februari 2014	Semesteran

No (1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
	dan Antariksa Nasional (LAPAN)	LAPAN, meliputi: 1. Data Resolusi Menengah Landsat 5, 2. Data Resolusi Menengah Landsat 7, 3. Data Resolusi Menengah Landsat 8, 4. Data Resolusi Tinggi SPOT 5, dan 5. Data Resolusi Tinggi SPOT 6 II. Data penginderaan jauh yang dimiliki LAPAN melalui pengadaan/pembelian data, meliputi: 1. Data resolusi tinggi <i>World View</i> ; 2. Data resolusi tinggi <i>Quick Bird</i> ; 3. Data resolusi tinggi		(5)	Langsung	1 Februari 2014	Semesteran

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40	Kementerian Pekerjaan Umum	<p><i>GeoEye</i>; <i>Pleiades</i>.</p> <p>4. Data resolusi tinggi</p> <p>Data Pemenang Lelang, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NPWP 2. Nama Pemenang 3. Alamat 4. Nomor Telepon 5. Jenis Usaha 6. Tanggal Izin Usaha 7. Masa Berlaku Izin Usaha 8. Nama Paket Pekerjaan 9. Lokasi Paket Pekerjaan 10. Tanggal Kontrak 11. Nilai Kontrak 12. Tanggal Surat Perintah Mulai Kerja 13. Masa Pelaksanaan 	<p>Jenis usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Konstruksi 2. Jasa Konsultansi 3. Penyedia barang/jasa lainnya 	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat 7 hari kerja setelah akhir triwulan)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
41	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	I. Data Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), yang paling sedikit memuat: 1. Nama badan hukum 2. NPWP badan hukum 3. Alamat badan hukum 4. Nama LKP 5. Alamat LKP 6. Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK) 7. Tanggal berdiri LKP 8. Alamat <i>email</i> LKP 9. Alamat <i>website</i> LKP 10. Nomor telepon LKP 11. Nomor <i>fax</i> LKP 12. Nama pimpinan LKP 13. NIK pimpinan LKP II. Data Sertifikasi Guru, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Guru 2. Alamat rumah 3. Tempat & Tanggal Lahir		Elektronik (5)	Langsung (6)	1 Desember 2014 (7)	Tahunan (tanggal 30 April tahun berikutnya) (8)
			Seluruh data diisi selengkap mungkin sesuai data yang dimiliki	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (tanggal 30 April tahun berikutnya)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		Guru 4. NPWP Guru 5. NIK Guru 6. Nomor Registrasi Guru (NRG) 7. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) 8. Nama Instansi Tempat Mengajar 9. Alamat Instansi Tempat Mengajar		(5)	(6)	(7)	(8)
		III. Data Sertifikasi Dosen, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Dosen 2. Alamat rumah 3. Tempat & Tanggal Lahir Dosen 4. NPWP Dosen 5. NIK Dosen 6. Nomor Induk Dosen	Seluruh data diisi selengkap mungkin sesuai data yang dimiliki	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (tanggal 30 April tahun berikutnya)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		Nasional (NIDN) 7. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) 8. Nama Instansi Tempat Mengajar 9. Alamat Instansi Tempat Mengajar		(5)	(6)	(7)	(8)
		IV. Data Penerima Dana Bantuan Sosial, yang paling sedikit memuat: 1. Nama badan hukum 2. NPWP badan hukum 3. Alamat badan hukum 4. Status penerima Bantuan Sosial (Komunitas Budaya/Sekolah Negeri/Sekolah Swasta/Lembaga Peduli Pendidikan)	Seluruh data diisi selengkap mungkin sesuai data yang dimiliki	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (tanggal 30 April tahun berikutnya)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
42	Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM	5. Tanggal pendirian 6. Alamat <i>email</i> 7. Alamat <i>website</i> 8. Nomor telepon 9. Nomor Faksimile 10. Nama pimpinan 11. NIK pimpinan 12. Nama Program Bantuan Sosial 13. Nilai Bantuan Sosial I. Data Pembuatan Paspur, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Pemegang Paspur 2. Nomor Paspur 3. Alamat Pemegang Paspur 4. Nomor KTP/NIK Pemegang Paspur 5. NPWP Pemegang Paspur		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Semesteran

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		II. Data Persetujuan Visa WNA, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Pemegang Visa 2. Nomor Paspor 3. Kewarganegaraan 4. Tanggal terbit paspor 5. Tanggal berakhir paspor 6. Nama Penjamin 7. Alamat Penjamin 8. NIK Penjamin 9. NPWP Penjamin 10. Jenis Visa		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Semesteran
		III. Data Perlintasan, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Pelintas Batas 2. Nomor Paspor 3. Tanggal Masuk Melintas 4. Tanggal Keluar Melintas 5. Tempat Pemeriksaan Imigrasi Masuk 6. Tempat Pemeriksaan	5. (Pada saat pelintas masuk Indonesia) 6. (Pada saat pelintas keluar	Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Semesteran

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
43	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Imigrasi Keluar I. Data Pendirian Perseroan Terbatas, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perseroan Terbatas 2. NPWP 3. Nomor Akta Pendirian 4. Tanggal Akta Pendirian 5. Nama Notaris yang Membuat Akta Pendirian 6. Tempat Kedudukan Notaris yang Membuat Akta Pendirian 7. Nama Notaris yang Membuat akta Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka pendirian 8. Tempat Kedudukan Notaris yang Membuat	Indonesia)	Elektronik	Online	1 Desember 2014	Semesteran (Paling lambat akhir bulan Juni dan Desember)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		akta Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka pendirian 9. Alamat Lengkap 10. Tempat Kedudukan 11. Jangka Waktu Berdirinya 12. Maksud dan Tujuan 13. Kegiatan Usaha 14. Jenis Fasilitas 15. Jumlah Modal Dasar 16. Jumlah Modal Ditempatkan 17. Jumlah Modal Disetor 18. Nama Lengkap pemegang Saham 19. Alamat pemegang Saham 20. NIK Pemegang Saham 21. Nama Anggota Direksi 22. Alamat Anggota Direksi 23. NIK Anggota Direksi	10. Kota/Kabupaten 14. PMA/PMDN 15,16,17 Dalam Satuan Mata Uang Rupiah 19, 23, 26 jika orang asing, gunakan Paspor/KITAS/KITAP	(5)	(6)	(7)	(8)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		24. Nama Anggota Dewan Komisaris. 25. Alamat Anggota Dewan Komisaris 26. NIK Anggota Dewan Komisaris 27. Nomor Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum 28. Tanggal Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum					
		II. Data Perubahan Perseroan Terbatas (PT), yang paling sedikit memuat: 1. Perubahan Nama PT 2. NPWP 3. Nomor Akta Perubahan 4. Tanggal Akta Perubahan	Diisi dalam hal terdapat Data Perubahan	Elektronik	Online	1 Desember 2014	Semesteran (Paling lambat akhir bulan bulan Juni dan Desember)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		5. Nama Notaris yang Membuat Akta Perubahan 6. Tempat Kedudukan Notaris yang Membuat Akta Perubahan 7. Perubahan Alamat Lengkap 8. Perubahan Tempat Kedudukan 9. Perubahan Jangka Waktu Berdirinya 10. Perubahan Maksud dan Tujuan 11. Perubahan Kegiatan Usaha 12. Perubahan Jenis Fasilitas 13. Perubahan Jumlah Modal Dasar 14. Perubahan Jumlah Modal Ditempatkan					

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		15. Perubahan Jumlah Modal Disetor 16. Perubahan Nama Lengkap pemegang Saham 17. Perubahan Alamat pemegang Saham 18. NIK Pemegang Saham 19. Perubahan Nama Anggota Direksi 20. Perubahan Alamat Anggota Direksi 21. NIK Anggota Direksi 22. Perubahan Nama Anggota Dewan Komisaris. 23. Perubahan Alamat Anggota Dewan Komisaris 24. NIK Anggota Dewan Komisaris 25. Nomor Keputusan	18, 21, 24 jika orang asing, gunakan Paspor/KITAS/KITAP				

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		Menteri Mengenai Persetujuan 26. Tanggal Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan 27. Nomor Pencatatan 28. Tanggal Pencatatan III. Data Pembubaran Perseroan Terbatas (PT), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Akta Pembubaran 2. Tanggal Akta Pembubaran 3. Nama Notaris yang Membuat Akta Pembubaran 4. Tempat Kedudukan Notaris yang Membuat Akta Pembubaran 5. Nomor penetapan pengadilannya atas Pembubaran		Elektronik	Online	1 Desember 2014	Semesteran (Paling lambat akhir bulan Juni dan Desember)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		<p>6. Tanggal penetapan pengadilian atas Pembubaran</p> <p>7. Nomor surat Pencatatan Pembubaran</p> <p>8. Tanggal Surat Pencatatan Pembubaran</p> <p>9. Nomor surat berakhirnya Badan Hukum</p> <p>10. Tanggal surat berakhirnya Badan Hukum</p>	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>IV. Data Pendirian Yayasan, yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama 2. NPWP 3. Nomor Akta Pendirian 4. Tanggal Akta Pendirian 5. Nama Notaris yang Membuat Akta Pendirian 	<p>Dalam hal yayasannya / pengurus/pengawas/ pembina jika orang asing, digunakan nomor Paspot/KITAS/KITAP</p>	Elektronik	Online	1 Desember 2014	Semesteran (Paling lambat akhir bulan Juni dan Desember)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		6. Tempat Kedudukan Notaris yang Membuat Akta Pendirian 7. Nama Notaris yang Membuat akta Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka pendirian 8. Tempat Kedudukan Notaris yang Membuat akta Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka pendirian 9. Alamat Lengkap 10. Tempat Kedudukan 11. Jangka Waktu Berdirinya 12. Maksud dan Tujuan 13. Kegiatan 14. Jumlah Kekayaan Awal 15. Nama Lengkap Pendiri 16. Alamat Pendiri					

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		17. NIK Pendiri 18. Nama Pembina 19. Alamat Pembina 20. NIK Pembina 21. Nama Pengurus. 22. Alamat Pengurus 23. NIK Pengurus 24. Nama Pengawas. 25. Alamat Pengawas 26. NIK Pengawas 27. Nomor Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Yayasan 28. Tanggal Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Yayasan		Elektronik	Online	1 Desember 2014	Semesteran (Paling lambat akhir bulan
		V. Data Perubahan Yayasan, yang paling sedikit memuat: 1. Perubahan Nama					

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		Yayasan 2. NPWP 3. Nomor Akta Perubahan 4. Tanggal Akta Perubahan 5. Nama Notaris yang Membuat Akta Perubahan 6. Tempat Kedudukan Notaris yang Membuat Akta Perubahan 7. Perubahan Alamat Lengkap 8. Perubahan Tempat Kedudukan 9. Perubahan Jangka Waktu Berdirinya 10. Perubahan Kegiatan 11. Perubahan Nama Pembina 12. Perubahan Alamat Pembina 13. NIK Pembina (Nomor	13, 16, 19 jika orang asing, gunakan Paspor/KITAS/KITAP				Juni dan Desember)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		Paspur dalam hal Orang Asing) 14. Perubahan Nama 15. Perubahan Alamat 16. NIK Pengurus 17. Perubahan Nama 18. Perubahan Alamat 19. NIK Pengawas 20. Nomor Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan 21. Tanggal Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan 22. Nomor Pencatatan 23. Tanggal Pencatatan					

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		VI. Data Pembubaran Yayasan, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Akta Pembubaran 2. Tanggal Akta Pembubaran 3. Nama Notaris yang Membuat Akta Pembubaran 4. Tempat Kedudukan Notaris yang Membuat Akta Pembubaran 5. Nomor penetapan pengacilan atas Pembubaran 6. Tanggal penetapan pengacilan atas Pembubaran 7. Nomor surat Pencatatan Pembubaran 8. Tanggal Surat Pencatatan Pembubaran		Elektronik	Online	1 Desember 2014	Semesteran (Paling lambat akhir bulan Juni dan Desember)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		<p>VII. Data Pendirian Perkumpulan, yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Perkumpulan 2. NPWP 3. Nomor Akta Pendirian 4. Tanggal Akta Pendirian 5. Nama Notaris yang Membuat Akta Pendirian 6. Tempat Kedudukan Notaris yang Membuat Akta Pendirian 7. Nama Notaris yang Membuat akta Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka pendirian 8. Tempat Kedudukan Notaris yang Membuat akta Perubahan Anggaran Dasar dalam 	<p>Dalam hal yayasannya/pendiri/pengurus/pengawas/pembina jika orang asing, digunakan Paspot/KITAS/KITAP</p>	Elektronik	Online	1 Desember 2014	Semesteran (Paling lambat akhir bulan Juni dan Desember)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		rangka pendirian 9. Alamat Lengkap 10. Tempat Kedudukan 11. Jangka Waktu Berdirinya 12. Maksud dan Tujuan 13. Kegiatan Perkumpulan 14. Nama Lengkap Pendiri 15. Alamat Pendiri 16. NIK Pendiri 17. Nama Pengurus 18. Alamat Pengurus 19. NIK Pengurus 20. Nama Pengawas 21. Alamat Pengawas 22. NIK Pengawas 23. Nomor Keputusan Menteri Mengenai Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan 24. Tanggal Keputusan Menteri Mengenai					

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		<p>Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan</p> <p>VIII. Data Perubahan Perkumpulan, yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Nama Perkumpulan 2. NPWP 3. Nomor Akta Perubahan 4. Tanggal Akta Perubahan 5. Nama Notaris yang Membuat Akta Perubahan 6. Tempat Kedudukan Notaris yang Membuat Akta Perubahan 7. Perubahan Alamat Lengkap 8. Perubahan Tempat Kedudukan 	<p>Dalam hal yayasannya Pembina/Pengawas/Orang Asing, digunakan nomor Paspas/KITAS/KITAP</p>	Elektronik	Online	1 Desember 2014	Semesteran (Paling lambat akhir bulan Juni dan Desember)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		9. Perubahan Jangka Waktu Berdirinya 10. Perubahan Maksud dan Tujuan 11. Perubahan Kegiatan 12. Perubahan Nama Perkumpulan 13. Perubahan Alamat Pengurus 14. NIK Pengurus 15. Perubahan Nama Pengawas 16. Perubahan Alamat Pengawas 17. NIK Pengawas 18. Nomor Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan 19. Tanggal Keputusan Menteri Mengenai Persetujuan					

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		20. Nomor Pencatatan 21. Tanggal Pencatatan IX. Data Pembubaran Perkumpulan, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Akta Pembubaran 2. Tanggal Akta Pembubaran 3. Nama Notaris yang Membuat Akta Pembubaran 4. Tempat Kedudukan Notaris yang Membuat Akta Pembubaran 5. Nomor penetapan pengadilatan atas Pembubaran 6. Tanggal penetapan pengadilatan atas Pembubaran 7. Nomor surat Pencatatan		Elektronik	Online	1 Desember 2014	Semesteran (Paling lambat akhir bulan Juni dan Desember)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		Pembubaran 8. Tanggal Surat Pencatatan Pembubaran X. Data Notaris, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Notaris 2. Tempat Lahir Notaris 3. Tanggal Lahir Notaris 4. Alamat Rumah Notaris 5. NPWP 6. NIK Notaris 7. Alamat Kantor 8. Wilayah Kerja Notaris 9. Nomor SK Pengangkatan Sebagai Notaris 10. Tanggal SK Pengangkatan Sebagai Notaris 11. Tanggal Berita Acara Sumpah (tanggal berlakunya		Elektronik	Online	1 Desember 2014	Semesteran (Paling lambat akhir bulan Juni dan Desember)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
44	Kementerian Perindustrian	<p>Data Tanda Pendaftaran Tipe (TPT) Kendaraan Bermotor, yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Perusahaan 2. Alamat Perusahaan 3. NPWP Perusahaan 4. Merek 5. Tipe Kendaraan 6. Jenis Kendaraan 7. Kapasitas Silinder (CC) 8. Jenis TPT 9. Jumlah Impor 	8. Jenis TPT meliputi : 1. Uji Tipe	Elektronik	Online	10 Oktober 2014	Triwulanan (setiap tanggal 1 Januari, 1 April, 1 Juli, dan 1 Oktober)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
45	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan	10. Realisasi Impor 11. Nomor TPT 12. Tanggal terbit TPT I. Data Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal (SIUAU/NB), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama 4. NPWP 5. Alamat Domisili Perusahaan 6. Nama Penanggung jawab (Direktur Utama) 7. Alamat Penanggung jawab	2. Impor 3. Produksi	Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari)
		II. Data Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (SIUAU/NTB), yang paling sedikit memuat:		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama 4. NPWP 5. Alamat Domisili 6. Nama Penanggung jawab (Direktur Utama) 7. Alamat Penanggung jawab		(5)	(6)	(7)	(8)
		III. Data Produksi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, yang paling sedikit memuat: 1. NPWP Perusahaan 2. Nama Perusahaan 3. Aircraft Km 4. Aircraft departure 5. Aircraft hours 6. Passenger carried (dalam ton) 7. Freight carried (dalam ton) 8. Passenger Km		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		9. <i>Available Seat Km</i> 10. <i>Passenger Load Factor</i> (dalam %) 11. <i>Ton Km Performed</i> a. <i>Passenger</i> b. <i>Freight</i> c. <i>Mail</i> d. <i>Total</i> 12. <i>Available Ton Km</i> 13. <i>Weight Load Factor</i> (dalam %)		(5)	(6)	(7)	(8)
		IV. Data Pendaftaran dan Kebangsaan Pesawat Udara, yang paling sedikit memuat: 1. NPWP Perusahaan 2. Nama Perusahaan 3. Tanda Pendaftaran pesawat udara 4. <i>Serial Number</i> pesawat 5. Tipe pesawat 6. <i>Year of manufacturing</i>		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Tahunan (paling lambat bulan Februari)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
46	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan	<p>7. Tanggal Registrasi</p> <p>8. Nama pemilik pesawat</p> <p>9. Alamat pemilik pesawat</p> <p>10. <i>Lessor</i> pesawat</p> <p>I. Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek, yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Surat Keputusan Izin 2. Tanggal Surat Keputusan Izin 3. Nama Perusahaan 4. NPWP 5. Alamat Domisili 6. Masa Berlaku 7. Nama Direktur 8. Jumlah Armada Bus Antar Kota Antar Provinsi 9. Jumlah Armada Antar Jemput Antar Provinsi 		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 28 Februari)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		II. Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Surat Keputusan Izin 2. Tanggal Surat Keputusan Izin 3. Nama Perusahaan 4. NPWP 5. Alamat Domisili 6. Masa Berlaku 7. Nama Direktur 8. Jumlah Armada Bus Pariwisata 9. Jumlah Armada Taksi khusus Bandara Soekarno Hatta		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 28 Februari)
		III. Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Tahunan (paling lambat)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan/atau Alat Berat, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Surat Keputusan Izin 2. Tanggal Surat Keputusan Izin 3. Nama Perusahaan 4. NPWP 5. Alamat Domisili 6. Masa Berlaku 7. Nama Direktur 8. Jumlah Armada Barang khusus 9. Jumlah Armada Alat Berat					setiap tanggal 28 Februari)
47	Kementerian Kesehatan	I. Data Izin Penyalur Alat Kesehatan (Alkes) dan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), yang paling sedikit memuat:		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Semesteran (paling lambat tanggal 10 Juli dan 10 Januari)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Nama Direktur 7. Nama Penanggung Jawab Teknis II. Data Izin Pedagang Besar Farmasi, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. NPWP 5. Alamat	1. Ref. Nomor izin: a. AK.1 (Sertifikat Produksi alkes/PKRT) b. AK.2 (Izin Penyalur alkes)	Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Semesteran (paling lambat tanggal 10 Juli dan 10 Januari)
		III. Data izin Industri Farmasi, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Semesteran (paling lambat tanggal 10 Juli dan 10 Januari)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		4. NPWP 5. Alamat		(5)	(6)	(7)	(8)
		IV. Data Izin Industri Obat Tradisional, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. NPWP 5. Alamat		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Semesteran (paling lambat tanggal 10 Juli dan 10 Januari)
		V. Data izin Industri Ekstrak Bahan Alam, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. NPWP 5. Alamat		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Semesteran (paling lambat tanggal 10 Juli dan 10 Januari)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		VI. Data izin Industri Kosmetika, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal Izin 3. Nama Perusahaan 4. NPWP 5. Alamat		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Semesteran (paling lambat tanggal 10 Juli dan 10 Januari)
		VII. Daftar Apotek, yang paling sedikit memuat: 1. Nama 2. Nomor Izin apotek 3. Alamat 4. Nama Apoteker Penanggung Jawab		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Semesteran (paling lambat tanggal 10 Juli dan 10 Januari)
		VIII. Daftar Rumah Sakit teregistrasi, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Rumah Sakit 2. Jenis Rumah Sakit		Elektronik	Langsung	10 Desember 2014	Semesteran (paling lambat tanggal 10 Juli dan 10 Januari)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
48	Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	3. Kelas Rumah Sakit 4. Alamat Rumah Sakit 5. Direktur 6. Penyelenggara 7. Kab/Kota 8. Kode Pos 9. Telepon 10. Fax 11. Email 12. Telepon Humas 13. Website 14. Data Ijin I. Daftar BUMN, yang paling sedikit memuat: 1. Nama 2. NPWP 3. Jenis Usaha 4. Alamat Keduudukan 5. Tanggal Izin Usaha 6. Jumlah Cabang	6. Penyelenggara: Kemenkes/Propinsi/kab,kota/swasta	Elektronik	Langsung	5 Desember 2014	Tahunan (Paling lambat tanggal 31 Juli)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		II. Ikhtisar Kinerja BUMN : 1. Nama 2. NPWP 3. Tahun Buku 4. Total Aset 5. Total Penjualan/ Pendapatan 6. Total Biaya (Harga Pokok Penjualan + Beban Usaha) 7. Laba/Rugi Usaha 8. Pendapatan dan Beban Lain-Lain (<i>Netto</i>) 9. Laba/Rugi Bersih 10. <i>Return on Investment</i> (ROI) 11. <i>Return on Asset</i> (ROA)		Elektronik	Langsung	5 Desember 2014	Tahunan (Paling lambat tanggal 31 Juli)
		III. <i>Listing Utang Rekening Dana Investasi/Subsidiary Loan Agreement (RDI/SLA)</i> , yang terdiri dari:		Elektronik	Langsung	5 Desember 2014	Tahunan (Paling lambat tanggal 31 Juli)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		1. Nama BUMN 2. NPWP 3. Jumlah Utang		(5)	(6)	(7)	(8)
		IV. Penyerapan Dana <i>Public Service Obligation</i> (PSO), yang terdiri dari: 1. Nama BUMN 2. NPWP 3. Jumlah Nilai Subsidi		Elektronik	Langsung	5 Desember 2014	Tahunan (Paling lambat tanggal 31 Juli)
		V. Data Restrukturisasi Perusahaan BUMN, yang paling sedikit memuat: 1. Data Program <i>Rightizing</i> BUMN yang terdiri dari: a. Nama BUMN b. NPWP c. Nilai sebelum d. Nilai sesudah 2. Data Program Privatisasi BUMN, yang terdiri dari:		Elektronik	Langsung	5 Desember 2014	Tahunan (Paling lambat tanggal 31 Juli)

No (1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
49	Kementerian Agama	a. Nama BUMN b. NPWP c. Persentase Saham yang Dilepas d. Metode Privatisasi e. Nilai Privatisasi I. Data Jemaah Haji Khusus, yang paling sedikit memuat: 1. Nama jemaah haji 2. Alamat jemaah haji 3. NIK jemaah haji 4. Tempat lahir jemaah haji 5. Tanggal lahir jemaah haji 6. Tahun keberangkatan 7. Nama Penyelenggara Ibadah Haji Khusus 8. Alamat Penyelenggara Ibadah Haji Khusus II. Data Penyelenggara Haji Khusus, yang paling sedikit		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (paling lambat tanggal 10 Januari)
				Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (paling lambat)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		memuat: 1. NPWP perusahaan 2. Nama perusahaan penyelenggara 3. Alamat perusahaan 4. Nomor Izin 5. Tanggal Izin 6. Masa berlaku izin 7. Jumlah jamaah yang diberangkatkan 8. Tahun keberangkatan 9. Nama penanggung jawab 10. Alamat penanggung jawab 11. NIK penanggung jawab 12. NPWP penanggung jawab					tanggal 10 Januari
		III. Data Penyelenggara Umrah, yang paling sedikit memuat: 1. NPWP perusahaan		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (paling lambat tanggal

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Nama perusahaan 3. Alamat perusahaan 4. Nomor Izin 5. Tanggal Izin 6. Masa berlaku izin 7. Nama penanggung jawab 8. Alamat penanggung jawab 9. NIK penanggung jawab 10. NPWP penanggung jawab					10 Januari
50	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Data Tahunan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), yang memuat data pertambangan mineral dan batubara meliputi : 1. Nama perusahaan	Data Tahunan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014 (untuk data tahun 2013)	Tahunan (setiap akhir bulan Januari tahun berikutnya)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		2. NPWP perusahaan 3. Alamat perusahaan 4. Persentase kepemilikan 5. Tahapan kegiatan kerja (eksplorasi/eksploitasi) 6. Tanggal kontrak ditandatangani 7. Tanggal kontrak berakhir 8. Luas Wilayah Kerja 9. Lokasi Wilayah Kerja 10. Tanggal kontrak diperpanjang 11. Tanggal berakhirnya Kontrak Perpanjangan	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		II. Data Ijin Usaha Pertambangan (IUP)/Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang paling sedikit memuat data :	Data IUP/IUPK yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah baik Gubernur/ Bupati/Walikota	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014 (untuk data tahun 2013)	Tahunan (setiap akhir bulan Januari tahun berikutnya)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		1. Nama pemegang IUP/IUPK 2. NPWP Pemegang IUP/IUPK 3. Alamat Pemegang IUP/IUPK 4. Kode Wilayah IUP/IUPK 5. Wilayah IUP/IUPK 6. Luas IUP/IUPK 7. Jenis IUP/IUPK yang diterbitkan 8. Instansi Penerbit dari IUP/IUPK (Pusat, Gubernur atau bupati) 9. Tanggal penerbitan IUP/IUPK 10. Jangka waktu penerbitan IUP/IUPK	7. Meliputi IUP/IUPK Eksplorasi atau IUP/IUPK operasi Produksi	(5)	(6)	(7)	(8)
		III. Data pembayaran royalti atau Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) oleh Kontraktor Karya atau Perjanjian Karya	Data pembayaran royalti atau Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) oleh Kontraktor Karya atau PKP2B oleh masing-masing Kontraktor	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014 (untuk data tahun 2013)	Tahunan (setiap akhir bulan Januari tahun berikutnya)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) oleh masing-masing Kontraktor yang paling sedikit memuat : 1. Nama Perusahaan 2. NPWP Perusahaan 3. Alamat Perusahaan 4. Lokasi Wilayah Pertambangan 5. Luas Wilayah Pertambangan 6. Jenis mineral dan batubara 7. Jumlah produksi 8. Nilai penjualan 9. Jumlah Royalti yang Dibayar 10. Periode Pembayaran Royalti	Data pembayaran iuran tetap, iuran eksplorasi dan iuran produksi (royalti) oleh	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014 (untuk data	Tahunan (setiap akhir bulan Januari
		IV. Data pembayaran iuran tetap, iuran eksplorasi dan iuran produksi (royalti) oleh	Data pembayaran iuran tetap, iuran eksplorasi dan iuran produksi (royalti) oleh	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014 (untuk data	Tahunan (setiap akhir bulan Januari

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		<p>pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP)/Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)/Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) baik mineral maupun batubara yang paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama pemegang IUP/IUPK/IPR 2. NPWP pemegang IUP/IUPK/IPR 3. Alamat pemegang IUP/IUPK/IPR 4. Kode Wilayah IUP/IUPK/IPR 5. Luas Wilayah IUP/IUPK/IPR 6. Lokasi Wilayah IUP/IUPK/IPR 7. Tahapan kegiatan usaha 8. Jenis mineral dan batubara 	<p>pemegang IUP/IUPK/IUPR baik mineral maupun batubara</p>	(5)	(6)	(7)	<p>tahun berikutnya</p>

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		9. Jumlah Produksi 10. Nilai Penjualan 11. Jumlah Iuran Tetap 12. Jumlah Iuran Eksplorasi 13. Jumlah Iuran Produksi (Royalti) 14. Periode Pembayaran Iuran					
		V. Data Badan Usaha Jasa Penunjang Pertambangan yang telah mendapat ijin dari Pemerintah Pusat, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Badan Usaha 2. NPWP Badan Usaha 3. Alamat Badan Usaha 4. Jenis dan bidang usaha yang dilakukan 5. Nomor Ijin Usaha 6. Tanggal Ijin Usaha 7. Lokasi usaha	Data Badan Usaha Jasa Penunjang Pertambangan yang telah mendapat ijin dari pemerintah	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014 (untuk data tahun 2013)	Tahunan (setiap akhir bulan Januari tahun berikutnya)

No (1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		VI. Data cadangan terkira/terbukti atas pertambangan mineral dan batubara per wilayah untuk Kontrak Karya dan PKP2B	Informasi data cadangan terkira/terbukti atas pertambangan mineral dan batubara per wilayah kerja	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014 (untuk data tahun 2013)	Tahunan (setiap akhir bulan Januari tahun berikutnya)
		VII. Data Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara Kontraktor Kontrak Karya dan PKP2B yang paling sedikit memuat : 1. Nama Perusahaan 2. NPWP Perusahaan 3. Alamat Perusahaan 4. Lokasi wilayah pertambangan 5. Luas wilayah pertambangan 6. Jumlah produksi 7. Nilai penjualan Domestik 8. Nilai penjualan Ekspor 9. Tujuan penjualan	Data Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara Kontraktor Kontrak Karya dan PKP2B 6, 7, 8 Data per bulan atau disesuaikan dengan pembayaran royalti atau Dana Hasil Produksi Batubara	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014 (untuk data Semester I tahun 2014)	Semesteran (setiap akhir bulan Januari dan Juli)

No (1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		Domestik 10. Tujuan penjualan Ekspor 11. Jumlah yang diolah di dalam negeri.	(DHPB)	(5)	(6)	(7)	(8)
		VIII.Data Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara pemegang IUP/IUPK/IPR baik mineral maupun batubara yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memuat : 1. Nama pemegang IUP/IUPK/IPR 2. NPWP pemegang IUP/IUPK/IPR 3. Alamat pemegang IUP/IUPK/IPR 4. Lokasi wilayah pertambangan 5. Luas wilayah	Data Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara pemegang IUP/IUPK/IPR baik mineral maupun batubara yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang diterima oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014 (untuk data Semester I tahun 2014)	Semesteran (setiap akhir bulan Januari dan Juli)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		<p>pertambahan</p> <p>6. Jumlah produksi</p> <p>7. Nilai penjualan Domestik</p> <p>8. Nilai penjualan Ekspor</p> <p>9. Tujuan penjualan Domestik</p> <p>10. Tujuan penjualan Ekspor</p> <p>11. Jumlah yang diolah di dalam negeri.</p>	<p>6, 7, 8, 9 data per bulan atau disesuaikan dengan pembayaran iuran royalti</p>	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>IX. Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Kontrak Karya dan PKP2B yang telah disetujui Ditjen Minerba per tahun yang paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Perusahaan 2. NPWP Perusahaan 3. Alamat Perusahaan 4. Tanggal disetujui RKAB 	<p>Laporan RKAB Kontraktor Kontrak Karya dan PKP2B yang telah disetujui Ditjen Minerba untuk setiap Kontraktor dan per tahun</p>	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014 (untuk data tahun 2013)	Tahunan (setiap akhir bulan Januari tahun berikutnya)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	(2)	Rincian Jenis Data dan Informasi	(3)	Deskripsi	(4)	Bentuk Data	(5)	Cara Penyampaian	(6)	Penyampaian Pertama Kali	(7)	(8)
			<p>X. Laporan RKAB pemegang IUP/IUPK/IPR baik mineral maupun batubara yang telah disetujui oleh penerbit IUP/IUPK/IPR per tahun yang paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama pemegang IUP/IUPK/IPR 2. NPWP pemegang IUP/IUPK/IPR 3. Alamat pemegang IUP/IUPK/IPR 4. Lokasi IUP/IUPK/IPR 5. Luas IUP/IUPK/IPR 6. Tanggal disetujui RKAB 	<p>(4)</p> <p>Laporan RKAB pemegang IUP/IUPK/IPR baik mineral maupun batubara yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang diterima oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.</p>	<p>(5)</p> <p>Elektronik</p>	<p>(6)</p> <p>Langsung</p>	<p>(7)</p> <p>1 Desember 2014 (untuk data tahun 2013)</p>	<p>(8)</p> <p>Tahunan (setiap akhir bulan Januari tahun berikutnya)</p>					
			<p>XI. Harga Patokan Batubara (HPB) untuk setiap jenis batubara baik <i>steam coal</i> maupun <i>cooking coal</i> setiap bulan.</p>		<p>(5)</p> <p>Elektronik</p>	<p>(6)</p> <p>Langsung</p>	<p>(7)</p> <p>1 Desember 2014</p>	<p>(8)</p> <p>Bulanan (setiap awal bulan berikutnya)</p>					

No (1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		XII. Harga Batubara Acuan (HBA) untuk setiap jenis batubara baik <i>steam coal</i> maupun <i>cooking coal</i> setiap bulan.		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Bulanan (setiap awal bulan berikutnya)
51	Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	I. Neraca Energi di Indonesia untuk jenis minyak bumi, gas bumi dan batubara, yang paling sedikit memuat : 1. Data produksi 2. Data impor 3. Data ekspor 4. Data penjualan II. Data komoditas mineral di Indonesia yang paling sedikit memuat : 1. Data produksi 2. Data ekspor 3. Data penjualan	Data Neraca Energi di Indonesia untuk jenis minyak bumi, gas bumi dan batubara setiap tahun	Elektronik	Langsung	5 Desember 2014	Tahunan (setiap bulan April tahun berikutnya)
			Data komoditas mineral di Indonesia untuk mineral utama seperti tembaga, emas, perak, bauksit, nikel, bijih dan pasir besi, dan timah.	Elektronik	Langsung	5 Desember 2014	Tahunan (setiap bulan April tahun berikutnya)
52	Kementerian Pertanian	I. Data Pendaftaran Pupuk Anorganik, yang paling		Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan 2. Alamat Perusahaan 3. NPWP Perusahaan 4. Nomor Pendaftaran 5. Nama Dagang/Merk 6. Jenis Pupuk		(5)	(6)	(7)	setiap tanggal 20 Januari
		II. Data Pendaftaran Pupuk Organik, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan 2. Alamat Perusahaan 3. NPWP Perusahaan 4. Nomor Pendaftaran 5. Nama Dagang/Merk 6. Jenis Pupuk		Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 20 Januari)
		III. Data Pendaftaran Pesticida, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan		Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal

No (1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		2. Alamat Perusahaan 3. NPWP Perusahaan 4. Nomor Pendaftaran 5. Nama Dagang Formulasi 6. Jumlah Formulasi 7. Pengadaan dalam tahun laporan 8. Penyaluran dalam tahun laporan		(5)	(6)	(7)	20 Januari
		IV. Data Pengujian Alat dan Mesin Pertanian, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Pemohon 2. Nama Perusahaan 3. Alamat Perusahaan 4. NPWP 5. Merk Dagang		Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 20 Januari)
		V. Data Pendaftaran Obat Hewan, yang paling sedikit		Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		memuat: 1. Nama Perusahaan Obat 2. Alamat Perusahaan 3. NPWP 4. Nomor Pendaftaran 5. Jenis Obat 6. Data Ekspor/Impor		(5)	(6)	(7)	setiap tanggal 20 Januari
		VI. Data Pendaftaran Pakan Ternak, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan 2. Alamat Perusahaan 3. NPWP Perusahaan 4. Nama Dagang 5. Jenis Pakan 6. Kode Pakan		Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 20 Januari)
		VII. Data Laporan Produksi Pakan Ternak, yang paling sedikit memuat:		Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal

No (1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun laporan 2. Nama Perusahaan 3. Alamat Perusahaan 4. NPWP Perusahaan 5. Produksi 		(5)	(6)	(7)	20 Januari
		<p>VIII. Data Izin Usaha Obat Hewan, yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Perusahaan 2. Alamat Perusahaan 3. NPWP Perusahaan 4. Jumlah Pabrik 5. Alamat Lokasi Pabrik 		Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 20 Januari)
		<p>IX. Pelayanan Pengawasan Karantina Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu</p>		Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 20 Januari)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		<p>Tumbuhan Karantina (OPTK), yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Pengguna Jasa 2. Alamat Pengguna Jasa 3. NPWP Pengguna Jasa 4. Nama Media Pembawa 5. Negara Asal 6. Volume 					
		<p>X. Data Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman, yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Pemohon 2. Alamat Pemohon 3. NPWP Pemohon 4. Jenis Tanaman 5. Banyak Benih 6. Negara Pengirim 7. Negara Tujuan 		Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 20 Januari)

No (1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		8. Tempat Pemasukan/Pengeluaran		(5)	(6)	(7)	(8)
		XI. Data Izin Pemasukan Bibit Ternak, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan 2. Alamat Perusahaan 3. NPWP Perusahaan 4. Negara Asal 5. Nama Bibit Ternak 6. Jenis Bibit Ternak 7. Galur/Ras/Bangsa Bibit Ternak 8. Jumlah Bibit Ternak		Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 20 Januari)
		XII. Rekomendasi Teknis Pemasukan Daging, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Rekomendasi 2. Nama Perusahaan 3. Alamat Perusahaan		Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 20 Januari)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. NPWP Perusahaan 5. Negara Asal 6. Jenis 7. Pelabuan Masuk					
		XIII. Data Izin Pemasukan Agens Hayati, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Pengguna Jasa 2. Alamat Pengguna Jasa 3. NPWP 4. Nama Agens Hayati 5. Tujuan Pemasukan 6. Asal Negara 7. Jumlah Agens Hayati		Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 20 Januari)
		XIV. Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan 2. Alamat Perusahaan 3. NPWP Perusahaan		Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 20 Januari)

No (1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		4. Lokasi Kebun 5. Luas 6. Kapasitas 7. Jenis Ijin Usaha 8. Jenis Komoditas		(5)	(6)	(7)	(8)
		XV. Daftar Perusahaan Sawit, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan 2. Alamat Perusahaan 3. NPWP Perusahaan 4. Lokasi 5. Luas		Elektronik	Langsung	20 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap tanggal 20 Januari)
53	Kementerian Komunikasi dan Informatika	I. Data Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, yang paling sedikit memuat: 1. Nama penyelenggara 2. Alamat 3. NPWP 4. Nomor Akta Pendirian		Elektronik	Langsung	28 November 2014	Tahunan (bulan Januari)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		5. Tanggal Akta Pendirian 6. Jenis Jasa 7. Nomor Izin 8. Tanggal izin 9. Jangka waktu izin		(5)	(6)	(7)	(8)
		II. Data Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, yang paling sedikit memuat: 1. Nama penyelenggara 2. Alamat 3. NPWP 4. Nomor Akta Pendirian 5. Tanggal Akta Pendirian 6. Jenis Jaringan 7. Nomor Izin 8. Tanggal izin 9. Jangka waktu izin		Elektronik	Langsung	28 November 2014	Tahunan (bulan Januari)
		III. Data Perizinan Lembaga Penyiaran, yang paling sedikit memuat:		Elektronik	Langsung	28 November 2014	Tahunan (bulan Januari)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama 2. Alamat lembaga/perusahaan 3. NPWP 4. Nomor Akta Pendirian 5. Tanggal Akta Pendirian 6. Jenis penyiaraan 7. Nomor Izin 8. Tanggal izin 9. Jangka waktu izin 					
		<ol style="list-style-type: none"> IV. Data Pemegang Standardisasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi, yang paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama perusahaan 2. Alamat 3. NPWP Perusahaan 4. Nomor sertifikat 5. Tanggal sertifikat 6. Merek-tipe 7. Negara Asal Perangkat 	Jangka waktu sertifikasi tiga tahun	Elektronik	Langsung	28 November 2014	Tahunan (bulan Januari)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		8. Jenis sertifikasi 9. Kelompok Alat		(5)	(6)	(7)	(8)
		V. Data Pemegang Landing Right/Hak Labuh (Penye- lenggara Telekomunikasi atau Lembaga Penyiaran), yang paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan 2. Alamat 3. NPWP Perusahaan 4. Nomor hak labuh 5. Tanggal hak labuh 6. Nama Satelit 7. Asal negara satelit 8. Jangka waktu hak		Elektronik	Langsung	28 November 2014	Tahunan (bulan Januari)
		VI. Data Pemegang Izin Stasiun Radio (ISR), yang paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan		Elektronik	Langsung	28 November 2014	Tahunan (bulan Januari)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		2. Alamat 3. NPWP Perusahaan 4. Jenis <i>service</i> 5. Jenis <i>subservice</i> 6. Nomor izin 7. Tanggal izin 8. Jumlah Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi		(5)	(6)	(7)	(8)
		VII. Data Pemegang Izin Pita Frekuensi Radio (CDMA, GSM/DCS, UMTS/WCDMA, BWA), yang paling sedikit memuat: 1. Nama operator 2. Alamat 3. NPWP Perusahaan 4. Pita frekuensi 5. Nomor Izin 6. Tanggal Izin 7. Jangka waktu izin		Elektronik	Langsung	28 November 2014	Tahunan (bulan Januari)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
54	Kementerian Kelautan dan Perikanan	<p>8. Jumlah Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi</p> <p>I. Data Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Perusahaan/ 2. NPWP Perusahaan/ 3. Alamat Perusahaan/ Perorangan 4. Domisili Hukum 5. Nomor Izin 6. Tanggal Izin 7. Nomor Identitas Penanggung Jawab 8. Nama Penanggung Jawab 9. NPWP Penanggung Jawab 	7. dapat berupa NIK/No Paspor	Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		II. Data Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor izin SIUP 2. Nama Kapal 3. Nomor Izin SIPI 4. Tanggal Izin SIPI 5. Tanggal Kadaluwarsa SIPI 6. Gross Ton 7. Alat Tangkap 8. Tanda Selar 9. Wilayah Penangkapan 10. Status Izin		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)
		III. Data Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor izin SIUP 2. Nama Kapal 3. Nomor Izin SIKPI 4. Tanggal Izin SIKPI 5. Tanggal Kadaluwarsa		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)

No (1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		SIKPI 6. Gross Ton 7. Tanda Selar 8. Status Izin		(5)	(6)	(7)	(8)
		IV. Data Sertifikat Kelayakan Pengolahan, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan/ Perorangan 2. Alamat Unit Pengolahan Ikan 3. Jenis Produk 4. Nomor Izin Produk 5. Tanggal Terbit Izin Produk 6. Tanggal Masa berlaku Produk 7. NPWP Perusahaan dan/ atau NIK Penanggung Jawab	Sertifikat yang diberikan kepada unit pengolahan ikan yang telah menerapkan cara pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasional standar sanitasi.	Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)

No (1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		V. Data Izin Pemasukan Hasil Perikanan, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan/ Penanggung Jawab 2. Alamat Perusahaan/ Penanggung Jawab 3. Nomor Izin 4. Tanggal Izin 5. Masa berlaku 6. Jenis Produk yang akan dimasukkan 7. Jumlah Produk yang akan dimasukkan 8. Tempat Pemasukkan 9. NPWP Perusahaan dan/atau NIK Penanggung Jawab		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)
		VI. Data Lalu Lintas Ikan di dalam dan luar negeri (ekspor, impor, antar wilayah	Wilayah pemasaran berisi negara tujuan	Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		<p>dalam negeri), yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Perusahaan/Perorangan 2. Alamat Perusahaan/Perorangan 3. Nomor Izin Instalasi Karantina Ikan 4. Tanggal Izin Instalasi Karantina Ikan 5. Masa berlaku 6. Wilayah Pemasaran 7. Jenis lalu lintas (ekspor, impor, antar wilayah dalam negeri) 8. Jenis Produk yang dipasarkan 9. Jumlah produk yang dipasarkan/tahun 10. NPWP Perusahaan/Perorangan 11. Nama Pemilik/ 					Januari

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Penanggung Jawab 12. NIK Pemilik/ Penanggung Jawab					
		VII. Data Izin Penyediaan Obat Ikan (Produsen, Importir), yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan/ Perorangan 2. NPWP Perusahaan/ Perorangan 3. Alamat 4. Status (produsen/ importir) 5. Nomor Izin 6. Tanggal Izin 7. Masa berlaku 8. Nama Pemilik/ Penanggung Jawab 9. NIK Pemilik/ Penanggung Jawab		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		VIII. Data Produsen Perbenihan, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan/ Perorangan 2. NPWP Perusahaan 3. Alamat Perusahaan/ Perorangan 4. Jenis komoditas perbenihan 5. Jumlah omzet tahunan (ekor) 6. Nama Pemilik/ Penanggung Jawab 7. NIK Pemilik/ Penanggung Jawab		Elektronik (5)	Langsung (6)	15 Desember 2014 (7)	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari) (8)
		IX. Data Usaha Budidaya, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan 2. NPWP Perusahaan 3. Alamat	Jenis Perizinan/ Rekomendasi: 1. Izin Pemasukan Ikan Hidup 2. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		4. Jenis Perizinan 5. Nomor Izin 6. Tanggal Izin 7. Masa berlaku 8. Komoditas budidaya 9. Nama Penanggung Jawab 10. NIK Penanggung Jawab	3. Rekomendasi Pembudayaan Ikan Penanaman Modal	(5)	(6)	(7)	(8)
		X. Data Pendaftaran Pakan ikan, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Perusahaan/ Perorangan 2. Alamat Perusahaan/ Perorangan 3. Merk produk 4. Nomor Pendaftaran/ Sertifikat 5. Tanggal Terbit Pendaftaran/Sertifikat 6. Tanggal Masa berlaku 7. Jumlah produk	Jumlah Produk per 6 (enam) bulan	Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Januari)

No	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
55	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<p>8. NPWP Perusahaan dan/atau NIK Penanggung Jawab</p> <p>I. Data Pengguna Tenaga Kerja Asing, yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama perusahaan/instansi 2. NPWP perusahaan/instansi 3. Alamat perusahaan/instansi 4. Nomor telepon, <i>fax</i>, <i>email</i> 5. Jumlah tenaga kerja asing 	Data pengguna tenaga kerja asing yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Elektronik	Langsung	5 Desember 2014	Triwulanan, (Paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah triwulan yang bersangkutan)
		<p>II. Daftar Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di Indonesia, yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama LPTKS 2. NPWP LPTKS 	Data yang disampaikan sebatas data LPTKS yang dikelola oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Elektronik	Langsung	5 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Desember)

No (1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		3. Nama pimpinan atau penanggung jawab LPTKS 4. Alamat LPTKS		(5)	(6)	(7)	(8)
		III. Daftar Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS), yang memuat: 1. Nama perusahaan 2. NPWP perusahaan 3. Nama pimpinan atau penanggung jawab 4. Alamat perusahaan	Data yang disampaikan sebatas data PPTKIS yang dikelola oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Elektronik	Langsung	5 Desember 2014	Tahunan (paling lambat setiap bulan Desember)
56	Komisi Pemilihan Umum	I. Data Calon Anggota Legislatif, yang paling sedikit memuat: 1. Nama 2. NIK 3. NPWP 4. Tempat lahir 5. Tanggal lahir		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat bulan Desember)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Alamat rumah 7. Riwayat pekerjaan terakhir 8. Partai 9. Daerah Pemilihan					
		II. Data Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang paling sedikit memuat: 1. Nama 2. NIK 3. NPWP 4. Tempat lahir 5. Tanggal lahir 6. Alamat rumah 7. Riwayat pekerjaan terakhir 8. Daerah Pemilihan		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat bulan Desember)
		III. Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Kampanye Partai Politik,		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat bulan)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		yang paling sedikit memuat: 1. Nama Partai Penerima Sumbangan 2. Nama Penyumbang 3. Nomor Identitas Penyumbang 4. NPWP Penyumbang 5. Alamat Penyumbang 6. Kriteria Penyumbang 7. Bentuk sumbangan 8. Nilai sumbangan (rupiah) 9. Kuantitas sumbangan (unit) 10. Keterangan	6. perserorangan/keompok/ badan usaha 7. uang/barang/jasa 9. Kuantitas barang yang disumbangkan				Desember
		IV. Daftar Laporan Penerimaan Dana Sumbangan Kampanye calon anggota DPD, yang paling sedikit memuat:		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat bulan Desember)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Calon Anggota DPD Penerima Sumbangan 2. Nama Penyumbang 3. Identitas Penyumbang 4. NPWP Penyumbang 5. Alamat Penyumbang 6. Kriteria Penyumbang 7. Bentuk sumbangan 8. Nilai sumbangan (rupiah) 9. Kuantitas sumbangan (unit) 10. Keterangan 	<ol style="list-style-type: none"> 6. perserorangan/kelompok/ badan usaha 7. uang/barang/jasa 9. kuantitas barang yang disumbangkan 				
		<ol style="list-style-type: none"> V. Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana calon Presiden/Wakil Presiden, yang paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Pasangan Calon 		Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan (paling lambat bulan Desember)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
57	Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)	Presiden/Wakil Presiden Penerima Sumbangan Nama Penyumbang 2. Identitas Penyumbang 3. NPWP Penyumbang 4. Alamat Penyumbang 5. Kriteria Penyumbang 6. Bentuk sumbangan 7. Nilai sumbangan 8. (rupiah) 9. Kuantitas sumbangan (unit) 10. Keterangan	6. perserorangan/kelompok/ badan usaha 7. uang/barang/jasa 9. Kuantitas barang yang disumbangkan	Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		5. NIK Pemilik 6. Tahun pembuatan 7. Tahun Registrasi 8. Jenis Kendaraan 9. Merk Kendaraan 10. Tipe Kendaraan 11. Isi Silinder (cc) 12. Bahan Bakar		(5)	(6)	(7)	(8)
		II. Data Mutasi kendaraan /perubahan identitas Kendaraan Bermotor, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Polisi lama 2. Nama Pemilik lama 3. Alamat Pemilik lama 4. NPWP Pemilik lama 5. NIK Pemilik lama 6. Nomor Polisi baru 7. Nama Pemilik baru 8. Alamat Pemilik baru 9. NPWP baru	Data mutasi kendaraan adalah informasi yang terkait arus perpindahan kendaraan, baik itu kepemilikan maupun lokasi.	Elektronik	Langsung	15 Desember 2014	Tahunan

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
58	Kementerian Pertahanan	10. NIK Pemilik baru 11. Tahun pembuatan 12. Jenis Kendaraan 13. Merk Kendaraan 14. Tipe Kendaraan 15. Isi Silinder (cc) 16. Bahan Bakar I. Data Izin Produksi, Pengadaan, Penyimpanan, Pendistribusian dan Jasa Peledak, yang paling sedikit memuat : 1. Nama Perusahaan 2. NPWP Perusahaan 3. Alamat 4. Jenis Perizinan 5. Nama Penanggung Jawab Perusahaan 6. Nomor KTP Penanggung Jawab 7. NPWP Penanggung Jawab	5. Penanggung Jawab adalah Dirut/Pihak yang nyata- nyata bertanggung jawab.	Elektronik	Langsung (email)	10 Desember 2014 (data mulai tahun 2013)	Tahunan (tanggal 30 April tahun berikutnya)

No (1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		II. Data Informasi Peserta dan Pemenang Lelang atau Seleksi atau Penyedia Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian dan TNI, yang paling sedikit memuat : 1. Nomor Kontrak 2. Nama Kontrak 3. Penyelenggara Pengadaan 4. Nama Perusahaan Pemenang Pengadaan 5. NPWP Perusahaan Pemenang Pengadaan 6. Alamat Perusahaan Pemenang Pengadaan 7. Nama Penanggung Jawab Perusahaan 8. Nomor KTP Penanggung Jawab		Elektronik	Langsung (<i>email</i>)	10 Desember 2014 (data mulai tahun 2013)	Tahunan (tanggal 30 April tahun berikutnya)

No (1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		9. NPWP Penanggung Jawab 10. Harga Perkiraan Sendiri 11. Nilai Kontrak		(5)	(6)	(7)	(8)
59	Kementerian Kehutanan	I. Data Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam (IUPHHK-HA), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal Berdiri Perusahaan 7. Nama Penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		II. Data Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal Berdiri Perusahaan 7. Nama Penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)
		III. Data Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Restorasi Ekosistem		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
	(2)	(3) (IUPHHK-RE), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal Berdiri Perusahaan 7. Nama Penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) bulan April, Juli, Oktober, Januari)
		IV. Data Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal Berdiri Perusahaan 7. Nama Penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi					
		V. Data Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal Berdiri Perusahaan 7. Nama Penanggung jawab		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi		(5)	(6)	(7)	(8)
		VI. Data Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan Karbon dan/atau Penyimpanan Karbon (IUP RAP-KARBON dan/atau IUP PAN-KARBON), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal Berdiri Perusahaan 7. Nama Penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	9. Luas 10. Lokasi VII. Data Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas di atas 6000m ³ /thn (IUIPHHK >6000 m ³ /thn), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal Berdiri Perusahaan 7. Nama Penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)	

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		VIII. Data Izin Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal Berdiri Perusahaan 7. Nama Penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)
		IX. Data Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan/Non		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober,

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		<p>Tambah, yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal Berdiri Perusahaan 7. Nama Penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi 		(5)	(6)	(7)	(8) Januari
		<p>X. Data Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk Kegiatan Survey/Eksplorasi, yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Izin 2. Tanggal izin 		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal Berdiri Perusahaan 7. Nama Penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi		(5)	(6)	(7)	(8)
		XI. Data Izin Lembaga Konservasi (LK), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal Berdiri Perusahaan 7. Nama Penanggung jawab		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi					
		XII. Data Izin Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL), yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal Berdiri Perusahaan 7. Nama Penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		XIII. Data Izin Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal Berdiri Perusahaan 7. Nama Penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi 11. Kuota Edar Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)
		XIV. Data Izin Usaha Penyedia Sarana Wisata Alam (IUPSWA), yang paling sedikit memuat:		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April,

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal Berdiri Perusahaan 7. Nama Penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi 					Juli, Oktober, Januari)
		XV. Data Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam (IUPJWA), yang paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal Berdiri 		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		Perusahaan 7. Nama Penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi		(5)	(6)	(7)	(8)
		XVI. Data Izin Ekspor Benih/ Bibit Tanaman Hutan, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal Berdiri Perusahaan 7. Nama Penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		XVII. Data Izin Impor Benih/Bibit Tanaman Hutan, yang paling sedikit memuat: 1. Nomor Izin 2. Tanggal izin 3. Nama perusahaan 4. NPWP 5. Alamat 6. Tanggal Berdiri Perusahaan 7. Nama Penanggung jawab 8. NPWP/NIK penanggung jawab 9. Luas 10. Lokasi		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Triwulanan (Paling lambat tanggal 10 bulan April, Juli, Oktober, Januari)
60	Kementerian Koperasi dan UKM	I. Data Koperasi, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Koperasi 2. Nomor Badan Hukum 3. Tanggal Berdiri Koperasi		Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (setiap bulan Maret)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Alamat 5. NPWP 6. Daftar Nama Pengurus 7. NIK Pengurus 8. Bidang Usaha					
		II. Data Penerima Program Bantuan Kementerian Koperasi dan UKM, yang paling sedikit memuat: 1. Nama Penerima Bantuan 2. NPWP Penerima Bantuan 3. Nomor Pendirian Badan Hukum Penerima Bantuan 4. Tanggal Pendirian Badan Hukum Penerima Bantuan 5. Alamat Penerima Bantuan 6. Tahun Anggaran 7. Nama Program	3 dan 4 diisi jika penerima bantuan merupakan badan hukum	Elektronik	Langsung	1 Desember 2014	Tahunan (setiap bulan Maret)

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		8. Nilai Bantuan (dalam rupiah)		(5)	(6)	(7)	(8)
61	Badan Pusat Statistik (BPS)	I. Direktori Eksportir/Importir, yang paling sedikit memuat : 1. Nama Direktori 2. Tahun 3. Nama perusahaan 4. Alamat perusahaan 5. Klasifikasi produk berdasarkan <i>Harmonized System (HS)</i> II. Direktori Manufaktur, yang paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan 2. Alamat perusahaan 3. Klasifikasi produk berdasarkan <i>Harmonized System (HS)</i>	Merupakan direktori dari 10 (sepuluh) perusahaan dengan nilai ekspor/impor terbesar dalam satu tahun.	Elektronik	<i>Online</i>	10 Desember 2014	Tahunan
				Elektronik	<i>Online</i>	10 Desember 2014	Tahunan

No (1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		III. Direktori Perkebunan Sawit, yang paling sedikit memuat: 1. Nama perusahaan 2. Alamat perusahaan		Elektronik	Online	10 Desember 2014	Tahunan
		IV. Produk Domestik Bruto (PDB) menurut Lapangan Usaha, yang paling sedikit memuat: 1. PDB atas dasar harga berlaku 2. PDB atas dasar harga konstan 2000		Elektronik	Online	10 Desember 2014	Triwulanan
		V. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha, yang paling sedikit memuat: 1. PDRB atas dasar harga berlaku 2. PDRB atas dasar harga konstan 2000	PDRB untuk tiap kabupaten/ kota dan provinsi	Elektronik	Online	10 Desember 2014	Tahunan

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		VI. Statistik Impor HS Terpilih yang paling sedikit memuat: 1. Nilai 2. Berat 3. Pelabuhan 4. Nama komoditas 5. Negara asal 6. KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)/kode ISIC <i>(International Standardization Industrial Code)</i>		Elektronik	Online	10 Desember 2014	Bulanan
		VII. Statistik Ekspor HS Terpilih, yang paling sedikit memuat: 1. Nilai 2. Berat 3. Pelabuhan 4. Nama komoditas		Elektronik	Online	10 Desember 2014	Bulanan

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain	Rincian Jenis Data dan Informasi	Deskripsi	Bentuk Data	Cara Penyampaian	Penyampaian Pertama Kali	Jadwal Penyampaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Negara tujuan 6. KBLI/kode ISIC					
		VIII. PDRB menurut Penggunaan, yang paling sedikit memuat: 1. PDRB atas dasar harga berlaku 2. PDRB atas dasar harga konstan 2000		Elektronik	Online	10 Desember 2014	Tahunan
		IX. Peta digital wilayah seluruh Kabupaten/Kota per desa/Kelurahan		Elektronik	Online	10 Desember 2014	Tahunan
		X. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) variabel terpilih	Data mikro Susenas	Elektronik	Online	10 Desember 2014	Tahunan
		XI. Data sakernas variabel terpilih	Data mikro survei angkatan kerja nasional	Elektronik	Online	10 Desember 2014	Tahunan

(1)	Nama Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (2)	Rincian Jenis Data dan Informasi (3)	Deskripsi (4)	Bentuk Data (5)	Cara Penyampaian (6)	Penyampaian Pertama Kali (7)	Jadwal Penyampaian (8)
		XII. Publikasi Tabel <i>input-Output</i>	Data yang menjelaskan keterkaitan antar sektor dalam perekonomian nasional	Elektronik	<i>Online</i>	10 Desember 2014	Tahunan
		XIII. <i>Master file</i> desa		Elektronik	<i>Online</i>	10 Desember 2014	Tahunan (setiap akhir bulan Desember)
		XIV. Data potensi desa (variabel terpilih)	Data mikro	Elektronik	<i>Online</i>	10 Desember 2014	Tahunan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI